

## SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Deranika Ratna Kristiana<sup>1\*</sup>, Apriliani Hasan<sup>2</sup>

<sup>1\*,2</sup> Program Studi Akuntansi / Ekonomi, STIE YKPN Yogyakarta, Indonesia

\*Email: [deranika@stieykpn.ac.id](mailto:deranika@stieykpn.ac.id)

---

### ABSTRACT

**Keywords:**  
Profit Sharing  
Fund; General  
Allocation Fund;  
Special  
Allocation  
Funds; Regional  
Original  
Revenue; and  
Regional  
Economic  
Growth.

*This research aims to determine the effect of revenue sharing funds, general allocation funds, special allocation funds, and local revenue on regional economic growth. This research was conducted at the Regency/City of South Kalimantan Province in 2014-2017. The data used in this study is secondary data obtained from the publication of the Indonesian Central Bureau of Statistics, namely the Realization of Regional Budget and GRDP Report on the basis of Constant Prices. The method used in this study is multiple regression analysis. The results of this study prove that partially or individually the general allocation fund and regional original income have a positive and significant effect on the economic growth of the Regency/City of South Kalimantan Province. Revenue sharing and special allocation funds have no significant effect on the economic growth of the Regency/City of South Kalimantan. Simultaneously profit sharing funds, general allocation funds, special allocation funds, and local revenue have a significant effect on the economic growth of the Regency/City of South Kalimantan Province.*

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari publikasian Badan Pusat Statistik Indonesia, yaitu Laporan Realisasi APBD dan PDRB atas dasar Harga Konstan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial atau individu dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Dana bagi hasil dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan. Secara simultan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

## PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan terhadap pendapatan perkapita suatu daerah. Pembangunan ekonomi memberikan manfaat dan dampak positif terhadap suatu daerah untuk meningkatkan dan melancarkan proses pertumbuhan ekonomi baik pusat maupun daerah. Desentralisasi merupakan sebagian kewenangan pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari adanya pelaksanaan asas desentralisasi.

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku sekarang ini serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki tekad yang sangat kuat untuk menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya kepada pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah yang berlaku memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam merencanakan dan menyusun anggaran keuangannya sendiri serta meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakatnya sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kemajuan daerahnya.

Penyerahan sebagian urusan pemerintahan pada dasarnya bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian daerah agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing antar daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3). Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut diperlukan anggaran daerah berupa APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang berisi tentang rencana keuangan terkait pendapatan dan pembelanjaan pemerintah daerah yang dibuat setiap tahun. Struktur utama dalam APBD salah satunya adalah pendapatan daerah.

Setiap daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tidak sama. Faktor penyebab hal tersebut terjadi karena terdapat perbedaan tenaga kerja, jumlah penduduk yang tidak sama, dan memiliki sumber daya alam yang berbeda antar daerah. Pada umumnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan sebagai alat pengukur pertumbuhan ekonomi daerah. PDRB diartikan sebagai nilai yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun berupa jumlah barang atau jasa. Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dikatakan mengalami perkembangan apabila daerah tersebut memiliki nilai PDRB yang meningkat setiap tahunnya.

**Tabel 1.** Perkembangan PDRB atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2017 (Miliar Rupiah)

Tahun	PDRB
2014	127,882
2015	137,056
2016	146,280
2017	159,594

**Sumber:** Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Nilai PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2014-2017, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perkembangan. Dana perimbangan dan pendapatan asli daerah diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendanai seluruh pengeluaran terkait kebutuhan daerah terutama untuk pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Fauzan, Amir, dan Kahar (2018) menyatakan bahwa besarnya dana perimbangan yang diterima akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah karena dana perimbangan sebagai dana tambahan untuk melengkapi kekurangan PAD dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Peneliti ingin mengetahui apakah dana perimbangan dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian oleh Wiraswasta *et al* (2018) menggunakan variabel pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan, sedangkan dalam penelitian ini lebih memperinci dana perimbangan agar dapat memberikan informasi detail terkait pertumbuhan ekonomi daerah pada Provinsi Kalimantan Selatan.

### **Teori Pertumbuhan Klasik**

Faktor penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith (1776) yaitu jumlah persediaan barang-barang modal, jumlah penduduk, seberapa besar tingkat teknologi yang digunakan, serta luas tanah dan kekayaan yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dicapai dengan memperhatikan 2 aspek utama, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan *output* total. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka *output* total akan bertambah. Pertumbuhan *output* (tingkat produksi) yang dimaksud adalah jumlah barang dan jasa. Faktor penyebab pertumbuhan *output* berupa barang dan jasa adalah tersedianya sumber-sumber alam, sumber daya manusia, dan stok barang kapital.

### **Teori Pertumbuhan Scumpeter**

*Scumpeter* (1991), pengusaha atau wirausahawan yang melakukan proses inovasi merupakan faktor penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang termasuk sebagai inovasi menurut scumpeter ada 5 macam, yaitu memperkenalkan produk baru, memperkenalkan metode baru cara berproduksi, mengadakan perluasan pasar atau pembukaan pasar baru, memperkenalkan sumber-sumber bahan mentah baru, dan meningkatkan efisiensi melalui pembentukan organisasi baru.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Di tingkat regional atau daerah disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tiga pendekatan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung angka-angka PDB/PDRB adalah pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Penyajian angka-angka dalam PDRB dapat

dilakukan dengan dua jenis pendekatan harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. Untuk mengukur struktur ekonomi, pergeseran, dan kemampuan sumber daya suatu daerah dapat menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan dari pertambahan nilai barang dan jasa. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan PDRB atas harga konstan yang dihitung berdasarkan harga tahun dasar dari penjumlahan barang dan jasa.

### **Dana Perimbangan**

Sumber pendapatan daerah yang tergolong besar penerimaannya adalah dana perimbangan sehingga diharapkan penerimaan dana ini mampu mengatasi ketimpangan fiskal yang disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan keuangan suatu daerah dengan daerah lainnya. Pemberian dana perimbangan dapat menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintahan daerah sehingga pelaksanaan desentralisasi dapat terlaksanakan sesuai dengan tujuannya. Dana perimbangan meliputi dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dana transfer umum merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan kewenangan daerah. Dana transfer umum terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Dana transfer khusus merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. Jenis dana transfer khusus adalah dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik.

## **HIPOTESIS**

### **Dana Bagi Hasil**

Penggunaan DBH diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat perbaikan lingkungan, fasilitas umum dan sosial, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan irigasi jalan dan jembatan agar dapat digunakan oleh masyarakat secara layak sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan akan memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi. DBH yaitu bagian dari dana perimbangan yang penerimaannya bersumber dari pajak dan bukan pajak (sumber daya alam). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan semakin tinggi apabila DBH yang direalisasikan berjumlah besar, sebaliknya apabila jumlah DBH yang direalisasikan rendah maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin rendah (Rahmah dan Basri, 2016) sehingga menyimpulkan bahwa secara positif dana bagi hasil akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah**

### **Dana Alokasi Umum**

Penggunaan DAU dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi sehingga kesejahteraan masyarakat

semakin meningkat. Semakin tingginya kesejahteraan masyarakat menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat karena indikator pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat. Husna dan Sofia (2013) menyimpulkan bahwa dana alokasi umum memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah**

### **Dana Alokasi Khusus**

DAK merupakan dana transfer khusus yang terdiri dari dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik. Dana alokasi khusus fisik merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK fisik meliputi DAK reguler, DAK infrastruktur publik daerah, dan DAK afirmasi. Dana alokasi khusus nonfisik merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah, seperti dana bantuan operasional sekolah, dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dana tunjangan profesi guru PNS daerah, dan dana bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana. Hasil penelitian dari Dewi dan Suputra (2017) yang menyimpulkan bahwa dana alokasi khusus tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

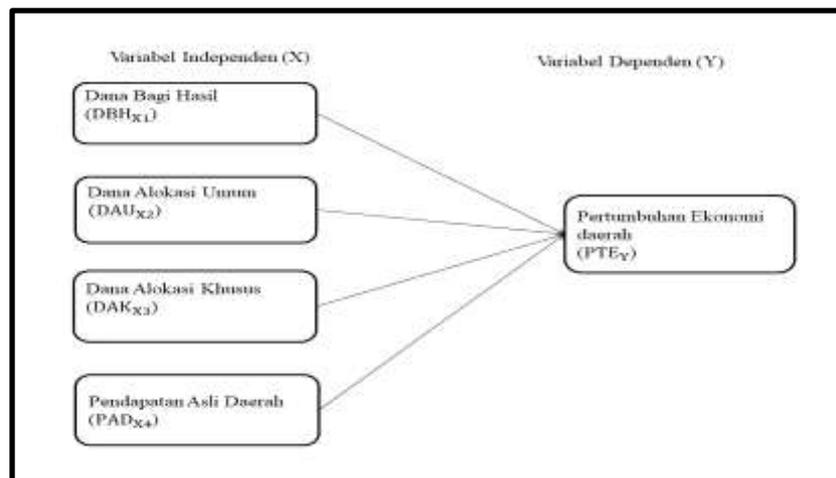
**H<sub>3</sub>: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah**

### **Pendapatan Asli Daerah**

PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk meningkatkan PAD pemerintah daerah dituntut untuk memainkan peranannya dalam menggali potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya karena PAD digunakan sebagai dana utama untuk mendanai segala pengeluarannya terkait kebutuhan daerah. PAD sebagai sumber pendanaan utama untuk mendanai kebutuhan daerah seharusnya mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penelitian yang telah dilakukan oleh Handayani, Rispantyo, dan Widarno (2017) menyimpulkan bahwa secara positif dan signifikan pendapatan asli daerah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah**





**Gambar 1.** Kerangka Pikir Penelitian

**Sumber:** Data diolah (2020)

## METODE

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini karena data yang disajikan berbentuk angka dan menggunakan data dokumenter yaitu jenis data penelitian berupa dokumen yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan, jurnal, faktur, dan sebagainya. Alat analisis yang digunakan untuk pengolahan data adalah program statistik berupa SPSS versi 24. Metode yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Penelitian ini menggunakan seluruh daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan sebagai objek populasi penelitian. Daerah Kabupaten/kota yang menjadi populasi adalah:

**Tabel 2.** Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Tanah Laut
2	Kabupaten Kota Baru
3	Kabupaten Banjar
4	Kabupaten Barito Kuala
5	Kabupaten Tapin
6	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8	Kabupaten Hulu Sungai Utara
9	Kabupaten Tabalong
10	Kabupaten Tanah Bumbu
11	Kabupaten Balangan
12	Kota Banjarmasin
13	Kota Banjar Baru

**Sumber:** <http://pemerintah.net/kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-selatan/>

Seluruh objek populasi digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu sebelas kabupaten dan dua kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga penelitian ini dinamakan penelitian sensus karena meneliti seluruh anggota populasi (Supomo dan Indriantoro, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang berjumlah 11 kabupaten dan 2 kota dengan periode waktu 4 tahun sehingga dalam penelitian ini menggunakan data yang berjumlah 52 sampel.

**Tabel 3.** Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah Data	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
<b>DBH</b>	52	93,792,195	571,335,759	249,279,784.40	125,395,180.300
<b>DAU</b>	52	312,301,730	722,092,250	507,683,159.70	100,143,000.800
<b>DAK</b>	52	1,394,025	322,105,279	128,502,663.10	86,304,882.820
<b>PAD</b>	52	13,022,533	324,977,988	126,579,139.60	56,960,206.930
<b>PTE</b>	52	2,40	6,96	4,8640	1,29697

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil pengujian pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata DBH yang diterima Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp249,279,784.40 dengan nilai minimum Rp93,792,195 yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017, dan nilai maksimum Rp571,335,759 yang dimiliki oleh Kabupaten Balangan pada tahun 2016. DAU yang diterima Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai rata-rata sebesar Rp507,683,159.70 dengan nilai minimum Rp312,301,730 dimiliki oleh Kabupaten Balangan pada tahun 2015, dan nilai maksimum Rp722,029,250 dimiliki oleh Kabupaten Banjar pada tahun 2016.

Nilai rata-rata DAK yang diterima Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp128,502,663.10 dengan nilai minimum Rp1,394,025 yang diterima oleh Kabupaten Tabalong pada tahun 2014, dan nilai maksimum Rp322,105,279 yang diterima oleh Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016. PAD yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai rata-rata sebesar Rp126,579,139.60 dengan nilai minimum Rp13,022,533 yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Kula pada tahun 2015, dan nilai maksimum Rp324,977,988 dimiliki oleh Kota Banjarmasin pada tahun 2017. Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4,8640% dengan nilai minimum 2,40% yang dimiliki oleh Kabupaten Balangan pada tahun 2015, dan nilai maksimum 6,96% dimiliki oleh Kota Banjar Baru pada tahun 2017.

**Tabel 4.** Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah Data	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
<b>DBH</b>	52	93,792,195	571,335,759	249,279,784.40	125,395,180.300
<b>DAU</b>	52	312,301,730	722,092,250	507,683,159.70	100,143,000.800
<b>DAK</b>	52	1,394,025	322,105,279	128,502,663.10	86,304,882.820
<b>PAD</b>	52	13,022,533	324,977,988	126,579,139.60	56,960,206.930
<b>PTE</b>	52	2,40	6,96	4,8640	1,29697

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil pengujian pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai rata-rata DBH yang diterima Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar

Rp249,279,784.40 dengan nilai minimum Rp93,792,195 yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017, dan nilai maksimum Rp571,335,759 yang dimiliki oleh Kabupaten Balangan pada tahun 2016. DAU yang diterima Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai rata-rata sebesar Rp507,683,159.70 dengan nilai minimum Rp312,301,730 dimiliki oleh Kabupaten Balangan pada tahun 2015, dan nilai maksimum Rp722,029,250 dimiliki oleh Kabupaten Banjar pada tahun 2016.

Nilai rata-rata DAK yang diterima Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp128,502,663.10 dengan nilai minimum Rp1,394,025 yang diterima oleh Kabupaten Tabalong pada tahun 2014, dan nilai maksimum Rp322,105,279 yang diterima oleh Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016. PAD yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai rata-rata sebesar Rp126,579,139.60 dengan nilai minimum Rp13,022,533 yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Kula pada tahun 2015, dan nilai maksimum Rp324,977,988 dimiliki oleh Kota Banjarmasin pada tahun 2017. Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4,8640% dengan nilai minimum 2,40% yang dimiliki oleh Kabupaten Balangan pada tahun 2015, dan nilai maksimum 6,96% dimiliki oleh Kota Banjar Baru pada tahun 2017.

**Tabel 5.** Koefisien Variabel Independen

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
<b>(Constant)</b>	-0,649	2,718	
<b>DBH</b>	-0,027	0,031	-0,195
<b>DAU</b>	0,113	0,039	0,514
<b>DAK</b>	0,049	0,30	0,244
<b>PAD</b>	0,078	0,037	0,243

**Sumber:** data diolah (2020)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 maka persamaan regresi berganda diperoleh sebagai berikut:

$$PTE_Y = (-0,649) - 0,027DBH_{X1} + 0,113 DAU_{X2} + 0,049 DAK_{X3} + 0,078 PAD_{X4}$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar -0,649 yang berarti apabila variabel independen diasumsikan bernilai 0 atau tidak terjadi peningkatan DBH, DAU, DAK, dan PAD maka pertumbuhan ekonomi memiliki nilai sebesar -0,649. Nilai koefisien dana bagi hasil sebesar -0,027 bertanda negatif menunjukkan bahwa jika variabel DBH mengalami peningkatan sebesar 1% maka penurunan sebesar 0,027 akan terjadi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya nilai koefisien DAU sebesar 0,113 bertanda positif menunjukkan bahwa jika DAU mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,113. DAK memiliki nilai koefisien sebesar 0,049 bertanda positif menunjukkan bahwa apabila DAK mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,049. Nilai koefisien yang dimiliki PAD sebesar 0,078 juga

bertanda positif menunjukkan jika PAD mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,078.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Kemampuan variabel independen yaitu DBH, DAU, DAK, dan PAD dalam menjelaskan variasi variabel dependennya yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur melalui pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ).

**Tabel 6.** Hasil Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,810 <sup>a</sup>	0,656	0,626	0,79273

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan pengujian pada tabel 6 memperlihatkan nilai square ( $R^2$ ) sebesar 0,656 hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen, yaitu DBH, DAU, DAK, dan PAD dapat menjelaskan variasi variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 65,6%, sedangkan sisanya sebesar 34,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

### Uji Parsial (Uji t)

Hasil pengujian dari uji parsial atau disebut juga uji t dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila dalam pengujian memiliki nilai t hitung > t tabel atau nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka hipotesis yang dibuat akan diterima. Nilai t tabel dalam penelitian ini dengan df=50 tingkat signifikansi 5% adalah 2,009.

**Tabel 7.** Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Model	t	Sig.
(Constant)	-0,239	0,812
DBH	-0,861	0,393
DAU	2,870	0,006
DAK	1,628	0,110
PAD	2,093	0,042

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 7, dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis, yaitu hipotesis pertama yang dibuat pada penelitian ini menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian hipotesis pertama memberikan hasil bahwa DBH memiliki nilai t hitung sebesar -0,861 < dari nilai t tabel 2,009 dan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,393 > 0,05. Keputusan yang diambil adalah hipotesis pertama yang dibuat pada penelitian ini ditolak karena tidak memenuhi kriteria sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh dana bagi hasil.

Pengujian hipotesis kedua memberikan hasil bahwa DAU memiliki nilai t hitung sebesar  $2,870 >$  nilai t tabel  $2,009$  dan nilai probabilitas signifikan  $< 0,05$  yaitu sebesar  $0,006$ . Hipotesis kedua yang dibuat dalam penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, hipotesis yang dibuat dapat diterima karena memenuhi kriteria sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh dana alokasi umum.

Hipotesis ketiga yang dirumuskan dalam penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis tersebut ditolak berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa DAK memiliki nilai t hitung sebesar  $1,628 <$  nilai t tabel  $2,009$  dan nilai probabilitas signifikan  $> 0,05$  yaitu sebesar  $0,110$ . Hasil pengujian tersebut tidak memenuhi kriteria sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh dana alokasi khusus.

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima. Hasil pengujian tersebut memenuhi kriteria, yaitu PAD memiliki nilai t hitung sebesar  $2,093 >$  t tabel  $2,009$  dan nilai probabilitas signifikan sebesar  $0,042 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pendapatan asli daerah.

### Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian hipotesis yang hasilnya dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila dalam pengujian memiliki nilai probabilitas signifikansi  $< 0,05$  maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dapat dibuktikan.

**Tabel 8.** Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

Model	F	Sig.
Regression	22,378	0,000 <sup>b</sup>

Sumber : Data diolah (2020)

Sesuai dengan hasil uji F pada tabel 8 memberikan hasil bahwa nilai F sebesar  $22,378$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama dipengaruhi oleh DBH, DAU, DAK, dan PAD.

Penelitian ini membuktikan bahwa dana bagi hasil tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2014-2017. Penelitian ini tidak sependapatan dengan hasil penelitian dari Rahmah dan Basri (2016) yang menyimpulkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Rahmah dan Basri (2016), besarnya DBH yang diterima daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar DBH yang diterima maka akan mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi daerah sebaliknya, apabila DBH yang diterima kecil maka tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

DBH yang diterima pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan laporan realisasi penerimaan tahun 2014-2017 tidak stabil dari tahun ke tahun. Rata-rata jumlah DBH yang diterima Kabupaten/Kota pada tahun 2015 lebih besar dari tahun 2014, namun pada tahun 2016 DBH yang diterima mengalami penurunan, dan pada tahun 2017 DBH yang diterima daerah paling rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan daerah dengan DBH yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan yang telah direncanakan karena DBH yang diterima tidak sesuai target, sehingga dana bagi hasil tidak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014-2017.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh dana alokasi umum. Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Husna dan Sofia (2013) yang menyimpulkan bahwa dana alokasi umum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Dana alokasi umum digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat serta digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di daerah tersebut. DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014-2017. Penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian dari Meilita, Sutomo, dan Jecline (2016) yang menyimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun penelitian ini sependapat dengan penelitian dari Dewi dan Suputra (2017) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh adanya dana alokasi khusus karena DAK hanya sebagian kecil digunakan untuk mendanai infrastruktur yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun berjalan sehingga DAK tidak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan kemungkinan menggunakan dana transfer khusus sebagian besar untuk mendanai kegiatan yang bersifat nonfisik sehingga DAK fisik hanya sebagian kecil digunakan untuk mendanai kegiatan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. DAK fisik kemungkinan digunakan untuk mendanai kebutuhan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas daerah pada tahun yang bersangkutan sehingga infrastruktur yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah seperti jalan/jembatan, jaringan irigasi tidak sepenuhnya dapat didanai dengan DAK fisik. Hal ini menyebabkan DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014-2017.

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014-2017.

Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Handayani, Rispantyo, dan Widarno (2017) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan berhasil memainkan perannya untuk menggali sumber-sumber dalam wilayahnya guna meningkatkan PAD sehingga dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan daerah. Pemerintah daerah mampu menggunakan PAD sebagai sumber pendanaan utama daerah dalam mendanai kebutuhan daerahnya yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar PAD yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan adalah penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan dipengaruhi dengan adanya dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah selama periode tahun 2014-2017, sedangkan dengan adanya dana bagi hasil dan dana alokasi khusus belum mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun bersangkutan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil pengujian uji parsial (t) yang menghasilkan nilai signifikansi DAU sebesar  $0,006 < 0,05$  dan nilai signifikansi PAD sebesar  $0,042 < 0,05$  yang mengindikasikan bahwa DAU dan PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil pengujian uji parsial (t) untuk DBH memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,393 > 0,05$  dan DAK memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,110 > 0,05$  yang mengindikasikan bahwa DBH dan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah terbukti dipengaruhi oleh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah, hal ini sesuai dengan peran dan fungsi dari DAU dan PAD sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiaya segala kebutuhan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. DAU sebagai komponen yang terbesar dalam dana perimbangan memiliki peran penting untuk kemajuan daerahnya. Peran penting DAU yaitu untuk mengurangi ketidakseimbangan keuangan antara suatu daerah dengan daerah lainnya.

Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah karena PAD memiliki peran penting, yaitu sebagai sumber pendanaan yang paling utama digunakan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerahnya. PAD yang dihasilkan suatu daerah apabila mengalami kenaikan maka akan terjadi kenaikan pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, apabila PAD yang dihasilkan rendah maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan rendah. Akan tetapi, Apabila peran DAU lebih dominan dibandingkan PAD dalam mendanai kebutuhan daerahnya maka daerah tersebut dikatakan masih bergantung pada pemerintah pusat untuk mendapatkan dana tambahan dan daerah tersebut belum mandiri dalam mendanai seluruh kebutuhan daerahnya. Penelitian ini juga membuktikan bahwa model dapat digunakan untuk

memprediksi hubungan antara variable independen terhadap variable dependen. Uji simultan (F) yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang mengindikasikan bahwa DBH, DAU, DAK, dan PAD dapat digunakan untuk memprediksi hubungan antar variabel.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adnestamaria. (2015). *Teori Ekonomi Schumpeter (Inovasi)*. Diakses 4 April, 2019, dari <https://adnestantiabenedith.wordpress.com/2014/06/09/teori-ekonomi-schumpeter-inovasi/>
- Anwar, M. L., Palar, W. S., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Berkalah Ilmiah Efisiensi*, 16.
- AR, R., & Zein, B. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1.
- Astria, S. A. (2014). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12.
- Chalid, P. (2015). *Teori Pertumbuhan*. Diakses 4 April, 2019, dari <http://repository.ut.ac.id/4601/1/MAPU5102-M1.pdf>
- Dewi, N. W., & Suputra, I. G. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.
- Fauzan, M., Mattulada, A., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako*, 6.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handayani, D. R., & Bambang, W. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 13.
- Husna, A., & Sofia, M. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal JEMI*, 4.

- Kuncoro, M. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.*
- Putri, Z. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 16.
- Rori, C., Luntungan, A., & Niode, A. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16.
- Satria, A. (2015). *Teori Pembangunan Ekonomi Menurut Para Ahli*. Diakses 5 April, 2019, dari <http://www.materibelajar.id/2015/12/materi-ekonomi-teori-pembangunan.html>
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik* (2 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Siswiyanti, P. (2015). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmko, M. (2002). *Ekonomi Publik* (1 ed.). Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Supomo, B., & Indriantoro, N. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (1 ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Tahar, A., & Zakhya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2013). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Widjaja, H. (2014). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomo*. Jakarta: Rajawali Persada.

Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M., & Adis, P. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) Diakses 23 April 2019

<https://kalsel.bps.go.id/> Diakses 23 April 2019